

# KLINIK DESA MEMBANGUN

Untuk Mewujudkan Tata Kelola Desa  
yang Lebih Baik



**BENTUK** Klinik Desa Membangun (KDM) adalah program untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola pembangunan yang akuntabel, transparan dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin dan rentan. Klinik Desa Membangun adalah gugus tugas yang dibentuk oleh camat sebagai media untuk mengakselerasi penguatan kapasitas aparatur desa di wilayahnya.

**LATAR BELAKANG** Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan paradigma baru dalam memandang desa. Undang-undang tersebut memberikan mandat dan peran lebih luas bagi pemerintah desa dalam mengelola urusan-urusan pemerintahan dan pembangunan. UU ini membawa perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan desa. Perubahan tersebut meliputi: kedudukan dan jenis desa, kewenangan desa, keuangan dan aset desa, pembangunan desa, peran dan tanggung jawab kepala desa, struktur dan tanggung jawab perangkat desa. Penguatan kapasitas aparatur desa dibutuhkan supaya mereka mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut untuk mewujudkan desa mandiri dan berdaulat. Selama ini tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa ada di kecamatan melalui PTPD (Pembina Teknis Pemerintahan Desa). Namun mengingat kompleksnya persoalan tatakelola desa, maka diperlukan kondolidasi sumber daya kecamatan untuk melakukan peningkatan kapasitas melalui sebuah gugus tugas yang kemudian dikenal dengan nama KDM.

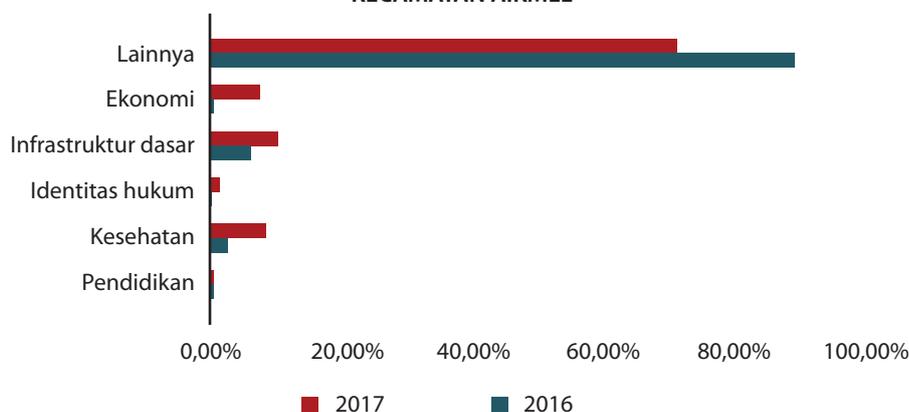
**PIHAK TERLIBAT** Kecamatan, puskesmas, UPT Pendidikan, fasilitator Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Program Keluarga Harapan (PKH) dan organisasi masyarakat sipil.

**DAMPAK**

- Kecamatan Aikmel, yang memiliki 20 desa (terbanyak di Kabupaten Lombok Timur) mampu menyusun perencanaan dan penganggaran desa (RKPDesa dan APBDesa) sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Meningkatnya alokasi anggaran pelayanan dasar dari 12,51% pada tahun 2016 menjadi 25,71% pada tahun 2017.
- Prestasi ini mendapat pengakuan dari pemerintah dengan diraihnya sejumlah penghargaan: peringkat III Provinsi NTB dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan desa 2017, peringkat II di regional IV dalam pembinaan dan pengawasan desa, peringkat I dalam fasilitasi dan monitoring pengelolaan dana desa, penghargaan dari Dirjen Perbendaharaan Kanwil NTB dan penghargaan Bupati Lombok Timur terhadap KDM dalam Bursa Inovasi Desa 2017.



**RATA-RATA ALOKASI ANGGARAN UNTUK PELAYANAN DASAR  
KECAMATAN AIKMEL**



### ➤ PROSES

1. Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas PTPD
2. Internalisasi peran PTPD dengan mendorong PTPD untuk memfasilitasi proses perencanaan dan penganggaran desa
3. Pemantapan PTPD melalui bimbingan teknis lanjutan
4. Pelembagaan PTPD dalam KDM melalui Surat Keputusan (SK) Camat Aikmel.
5. Operasionalisasi KDM
6. Replikasi di kecamatan lain

### ➤ PROSES REPLIKASI

Replikasi dilakukan melalui lokakarya berbagi pengalaman/pembelajaran penguatan pemerintah desa melalui PTPD/KDM pada Mei 2018. Lokakarya ini menghadirkan KDM Aikmel sebagai narasumber utama. Selain lokakarya, peserta juga berkunjung ke Kecamatan Aikmel untuk melihat langsung implementasi KDM.

### ➤ PERKEMBANGAN TERKINI

- Terbentuknya 25 tim PTPD kecamatan yang seluruhnya telah memiliki SK camat di Kabupaten Lombok Utara (3 kecamatan), Lombok Timur (2 kecamatan), Bima (18 Kecamatan) dan Sumbawa (2 kecamatan)
- PTPD yang telah melembagakan diri dalam bentuk KDM atau nama lain ada di Kecamatan Bolo (Bima), Kecamatan Plampang (Sumbawa) dan Kecamatan Terara (Lombok Timur).
- Kabupaten Bima dan Sumbawa telah memperkuat peran PTPD/KDM melalui peraturan bupati.
- KDM Aikmel menjadi model inovasi peran kecamatan dalam pembinaan desa dan akan direplikasi di seluruh kecamatan di Lombok timur

### ➤ TANTANGAN

#### Di tingkat provinsi dan kabupaten

- Belum berjalannya pembagian peran antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kecamatan dalam penguatan kapasitas aparatur desa.
- Kurangnya inovasi pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menyusun program penguatan kapasitas aparatur desa.

#### Di tingkat kecamatan

- Kurangnya kualitas dan kualitas aparatur kecamatan dalam pembinaan desa
- Kurangnya pemahaman dan komitmen camat atas peran kecamatan dalam pembinaan pemerintahan desa

#### Di level desa

- Kurangnya pemahaman sebagian aparatur desa terhadap pentingnya alokasi anggaran bagi pelayanan dasar dan penguatan kapasitas.